



Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pembangunan Perkotaan di Era Desentralisasi (Studi Kasus Kota Surabaya 2019–2023)

Abdullah Wisnu Bayu

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, Indonesia

Penulis Korespondensi: Wbayu7345@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the influence of good governance on urban development performance in the era of decentralization using a case study in the city of Surabaya during the period 2019–2023. This study uses a quantitative approach with descriptive research and utilizes secondary data obtained from official publications from the Central Statistics Agency (BPS) and Surabaya City Government documents. The good governance indicator in this study is proxied by the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), while urban development performance is measured by the Human Development Index (HDI), economic growth, and poverty levels. The study shows that the implementation of good governance in Surabaya has improved, as indicated by the SPBE index achievement of "Satisfactory." On the other hand, urban development performance shows a relatively positive trend. The HDI increased consistently throughout the study period. Economic growth contracted in 2020 due to the pandemic but recovered in subsequent years. While poverty levels, which increased during the pandemic, declined during the recovery period. Overall, the study findings demonstrate a positive relationship between good governance and urban development performance. Improving the quality of governance contributes to increasing policy effectiveness, improving public services, and supporting the economic and social recovery process for residents.*

Keywords: *City of Surabaya; Decentralization; Good Governance; SPBE; Urban Development.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good governance terhadap kinerja pembangunan perkotaan di era desentralisasi menggunakan studi kasus di Kota Surabaya selama periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan pusat Statistik serta dokumen Pemerintah Kota Surabaya. Indikator good governance pada penelitian ini diproksikan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis elektro (SPBE), sedangkan kinerja pembangunan perkotaan diukur melalui Indeks Pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan. yang akan terjadi penelitian membagikan bahwa penerapan good governance pada Kota Surabaya mengalami peningkatan, yang ditunjukkan melalui capaian indeks SPBE dengan predikat "Memuaskan". pada sisi lain, kinerja pembangunan perkotaan menunjukkan tren yang relatif positif. IPM mengalami peningkatan secara konsisten selama periode penelitian, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat pandemi tetapi kembali pulih di tahun-tahun berikutnya, serta tingkat kemiskinan yg semakin tinggi selama pandemi kemudian menurun pada masa pemulihan. Secara keseluruhan, hasil penelitian membagikan bahwa good governance memiliki hubungan positif menggunakan kinerja pembangunan perkotaan. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berkontribusi dalam mempertinggi efektivitas kebijakan, memperbaiki pelayanan publik, dan mendukung proses pemulihan ekonomi serta sosial warga.

Kata Kunci : Desentralisasi; Kota Surabaya; Pembangunan Perkotaan; Pemerintahan Yang Baik; SPBE.

1. PENDAHULUAN

Penerapan desentralisasi di Indonesia sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem pemerintahan, khususnya di tingkat daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dalam kerangka hukum yang berlaku, pembagian urusan pemerintahan antara pusat

dan daerah menjadi dasar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk menjadi lebih mandiri, responsif, dan adaptif dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam konteks tersebut, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan, terutama dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Ni'mah et al., 2021; Zięba, 2021). Daerah dengan tata kelola yang baik cenderung lebih mampu mengarahkan program pembangunan secara lebih terukur dan tepat sasaran.

Kota Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia menjadi laboratorium hidup implementasi good governance dalam skala perkotaan. Berbagai penghargaan nasional dan internasional yang diterima Surabaya selama beberapa tahun terakhir mulai dari penghargaan smart city, inovasi pelayanan publik, hingga tata kelola perkotaan yang berkelanjutan mencerminkan komitmen serius pemerintah kota dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Namun demikian, keberhasilan tersebut perlu diuji secara akademis untuk mengetahui sejauh mana implementasi good governance benar-benar berdampak pada kinerja pembangunan yang terukur.

Periode 2019–2023 dipilih sebagai fokus kajian karena mencakup berbagai dinamika yang kompleks: (1) fase konsolidasi pemerintahan setelah pilkada 2018 yang menghasilkan kepemimpinan baru; (2) tekanan luar biasa akibat pandemi Covid-19 yang menguji ketangguhan sistem tata kelola kota; (3) implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dipercepat melalui Perpres No. 95 Tahun 2018; serta (4) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 yang merumuskan visi pembangunan kota berbasis inovasi dan inklusi.

Persoalan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih terdapatnya kesenjangan antara capaian formal tata kelola yang diukur melalui indeks-indeks resmi dengan kondisi riil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa angka kemiskinan perkotaan di Surabaya meskipun menurun secara absolut, namun ketimpangan distribusi manfaat pembangunan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan (Wijaya & Santoso, 2022). Selain itu, efektivitas digitalisasi

pelayanan publik juga masih menghadapi tantangan literasi digital di kalangan penduduk rentan (Hidayat et al., 2023).

Salah satu konsep yang digunakan untuk menjelaskan kualitas tata kelola pemerintahan adalah *good governance*. Konsep ini menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perkembangan literatur terbaru, *good governance* tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pembangunan (Jahja, 2021; Karunia et al., 2023) .

Dalam praktiknya, penerapan *good governance* sering dikaitkan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki kompleksitas permasalahan yang tinggi. Pendekatan *good urban governance* menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, transparansi kebijakan, serta pengelolaan kota yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Bellastuti & Fathurrahman, 2023) . Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memiliki keterkaitan erat dengan kinerja pembangunan perkotaan.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang sering dijadikan contoh dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan dan inovasi tata kelola pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, Surabaya menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam berbagai indikator pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya pada tahun 2023 tercatat sebesar 83,99 dan termasuk dalam kategori sangat tinggi (BPS Kota Surabaya, 2023). Selain itu, persentase penduduk miskin menurun dari 4,65 persen pada Maret 2023 menjadi 3,96 persen pada Maret 2024 (BPS Kota Surabaya, 2024). Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2023 mencapai 5,70 persen, yang menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang relatif stabil.

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis teknologi.

Meskipun demikian, hubungan antara penerapan *good governance* dan kinerja pembangunan perkotaan tidak selalu bersifat sederhana. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kondisi ekonomi, kapasitas fiskal, serta dinamika sosial masyarakat (Ni'mah et al., 2021) . Oleh

karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana good governance berperan dalam mendukung kinerja pembangunan perkotaan di era desentralisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good governance terhadap kinerja pembangunan perkotaan di era desentralisasi dengan studi kasus Kota Surabaya tahun 2019–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tata kelola pemerintahan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Industri konstruksi memegang peranan penting dalam membentuk infrastruktur masyarakat modern, karena secara langsung mempengaruhi perekonomian, urbanisasi, dan pembangunan berkelanjutan. Manajemen yang efektif dalam proyek konstruksi sangat penting untuk memastikan kesuksesan teknis dan ekonomi dari proyek-proyek tersebut. Perkembangan terkini dalam manajemen proyek konstruksi menekankan pentingnya Value Engineering (VE) sebagai metode untuk mengoptimalkan biaya proyek dan meningkatkan kualitas. Menurut Sekur, Rematobi, Mandela, dan Murniyasih (2025), penerapan Value Engineering pada proyek pembangunan gedung tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan kinerja dan fungsionalitas bangunan secara keseluruhan. Hal ini sangat penting pada proyek skala besar di mana menjaga batasan anggaran sambil memastikan hasil berkualitas tinggi sangat diperlukan.

Selain itu, kualitas pekerjaan dalam proyek konstruksi sangat erat kaitannya dengan profesionalisme dan standar etika para insinyur yang terlibat. Profesionalisme, yang didasari oleh kode etik yang kuat, memastikan bahwa insinyur mempertahankan standar kualitas dan mematuhi peraturan yang berlaku. Seperti yang disorot oleh Pramesti, Aji, Hanafi, Darmawan, dan Suswanto (2025), kepatuhan terhadap etika dan kode etik insinyur memegang peran penting dalam keberhasilan penyelesaian proyek konstruksi. Studi tentang profesionalisme dan etika dalam industri konstruksi sangat penting untuk membangun budaya akuntabilitas dan memastikan bahwa praktik-praktik rekayasa berkontribusi positif terhadap kemajuan industri ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara value engineering dan etika profesional sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kesuksesan keseluruhan proyek konstruksi. Dengan menggabungkan praktik-praktik ini, para pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa proyek konstruksi tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui harapan dalam hal kualitas, keberlanjutan, dan efektivitas biaya.

2. KAJIAN TEORITIS

Grand Theory: Teori Governance

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah teori governance. Dalam kajian administrasi publik modern, governance tidak lagi dipahami sebagai aktivitas yang hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan melibatkan berbagai aktor seperti sektor swasta dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik (Meijer & Bolívar, 2021). Pergeseran ini menunjukkan perubahan dari model pemerintahan yang bersifat hierarkis menuju tata kelola yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Governance juga dapat dipahami sebagai cara kekuasaan dan otoritas dijalankan dalam pengelolaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam perspektif ini, kualitas pemerintahan tidak hanya dilihat dari hasil kebijakan, tetapi juga dari proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan tersebut (World Bank, 2022). Oleh karena itu, efektivitas institusi, transparansi, serta akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam perkembangannya, konsep governance melahirkan istilah good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta supremasi hukum. Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan good governance berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan, khususnya di negara berkembang (OECD, 2022; Karunia et al., 2023).

Dalam konteks pemerintahan daerah, teori governance menjadi semakin relevan pada era desentralisasi. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah menuntut adanya kapasitas tata kelola yang baik agar pemerintah daerah mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan secara efektif. Dengan demikian, teori governance menjadi landasan penting dalam menjelaskan hubungan antara kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pembangunan daerah.

Konsep Good Governance

Konsep good governance merupakan salah satu pendekatan utama dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam literatur terbaru, good governance tidak hanya dipahami sebagai seperangkat prinsip normatif, tetapi juga sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan kualitas pelayanan pemerintah (Karunia et al., 2023).

Selain itu, good governance juga berkaitan erat dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel cenderung lebih dipercaya

oleh masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan (Kim & Lee, 2021).

Dalam konteks Indonesia, penerapan good governance menjadi semakin penting sejak diberlakukannya desentralisasi. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pembangunan secara mandiri, sehingga kualitas tata kelola menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Prinsip-Prinsip Good Governance

Dalam penerapannya, good governance memiliki sejumlah prinsip utama yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta penegakan hukum (OECD, 2022; World Bank, 2022).

Transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga masyarakat dapat mengakses dan memahami kebijakan yang diambil. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada publik. Sementara itu, partisipasi masyarakat memungkinkan adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Di sisi lain, penegakan hukum menjadi dasar penting dalam menjamin kepastian kebijakan serta keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pemerintahan (Shah & Boadway, 2021). Dalam konteks Indonesia, desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Namun demikian, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan. Tanpa penerapan prinsip good governance, pelimpahan kewenangan justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti inefisiensi dan ketimpangan pembangunan (World Bank, 2022). Oleh karena itu, desentralisasi dan good governance merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Pembangunan Perkotaan

Pembangunan perkotaan merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah kota melalui berbagai aspek pembangunan. Dalam perspektif modern, pembangunan tidak hanya diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kualitas lingkungan (UN-Habitat, 2022).

Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memiliki karakteristik yang kompleks, seperti tingginya tingkat urbanisasi, kepadatan penduduk, serta kebutuhan terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan perkotaan memerlukan perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain itu, pembangunan perkotaan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pembangunan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, kemiskinan perkotaan, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan kota yang berkualitas harus mampu menciptakan lingkungan yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Pembangunan Perkotaan

Kinerja pembangunan perkotaan dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator utama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selain IPM, indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan juga digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi daerah, sedangkan tingkat kemiskinan mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Indikator-indikator tersebut penting untuk menilai apakah pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam konteks perkotaan yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks.

Hubungan Good Governance dengan Kinerja Pembangunan Perkotaan

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara good governance dan kinerja pembangunan daerah. Penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terbukti dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta kualitas pelayanan pemerintah (Kim & Lee, 2021; Andrews, 2021).

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga berkontribusi terhadap peningkatan indikator pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat (Meijer & Bolivar, 2021).

Dalam konteks perkotaan, hubungan ini menjadi semakin penting karena kompleksitas permasalahan kota membutuhkan tata kelola yang responsif, transparan, dan terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, good governance merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan perkotaan.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa good governance merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era desentralisasi. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum berperan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik serta kinerja pemerintah daerah.

Di sisi lain, kinerja pembangunan perkotaan dapat diukur melalui indikator seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, hubungan antara good governance dan kinerja pembangunan perkotaan menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, good governance diposisikan sebagai variabel independen, sedangkan kinerja pembangunan perkotaan sebagai variabel dependen.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini memanfaatkan data berbentuk angka yang diperoleh dari sumber resmi untuk menganalisis kondisi *good governance* dan kinerja pembangunan perkotaan di Kota Surabaya. Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti data numerik secara sistematis dan objektif (Sugiyono, 2022).

Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang ada (Sugiyono, 2022). Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk *time series*, yaitu data yang disusun berdasarkan urutan waktu dari tahun 2019 hingga tahun 2023, sehingga memungkinkan analisis perkembangan variabel penelitian dari waktu ke waktu.

Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui publikasi resmi, laporan pemerintah, dan dokumen statistik yang telah diterbitkan. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain sehingga peneliti dapat langsung menggunakannya untuk keperluan analisis (Sugiyono, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya publikasi *Kota Surabaya Dalam Angka* serta *Berita Resmi Statistik* yang memuat data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan Kota Surabaya.
- b. Dokumen resmi Pemerintah Kota Surabaya, terutama yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk data mengenai penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- c. Literatur ilmiah berupa jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan indikator *good governance* dan kinerja pembangunan perkotaan di Kota Surabaya.

- b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah data indikator *good governance* dan kinerja pembangunan perkotaan Kota Surabaya selama periode 2019–2023. Pemilihan periode tersebut dilakukan untuk menggambarkan perkembangan kondisi tata kelola pemerintahan dan pembangunan perkotaan dalam kurun waktu lima tahun secara lebih terfokus dan sistematis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan pengumpulan data sekunder.

- a. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *good governance*, pembangunan perkotaan, dan desentralisasi. Studi pustaka digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis penelitian (Sugiyono, 2022).

b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengakses data dari sumber resmi seperti publikasi Badan Pusat Statistik dan laporan Pemerintah Kota Surabaya. Data yang dikumpulkan meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, serta indikator tata kelola pemerintahan selama periode 2019–2023. Data sekunder dinilai efektif karena telah tersedia dan dapat langsung digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2022).

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

a. Variabel independen (X): Good Governance

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good governance*, yang diartikan sebagai kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Konsep ini mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan.

b. Variabel dependen (Y): Kinerja Pembangunan Perkotaan

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pembangunan perkotaan, yang diukur melalui:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 2) Pertumbuhan ekonomi
- 3) Tingkat kemiskinan

Definisi Operasional Variabel

a. Good Governance

Good governance adalah kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang ditunjukkan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Kinerja Pembangunan Perkotaan

Kinerja pembangunan perkotaan adalah tingkat keberhasilan pembangunan Kota Surabaya yang diukur melalui indikator IPM, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan selama periode 2019–2023.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan indikator *good governance* dan kinerja pembangunan perkotaan di Kota Surabaya selama periode 2019–2023.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara:

- a. Mengelompokkan data berdasarkan variabel penelitian, yaitu *good governance* dan kinerja pembangunan perkotaan.
- b. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap perkembangan data dari tahun ke tahun.
- c. Membandingkan perkembangan setiap indikator untuk melihat kecenderungan (trend) yang terjadi selama periode penelitian.
- d. Menginterpretasikan data dengan mengaitkan hasil temuan dengan teori *good governance* dan pembangunan perkotaan.

Analisis deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara tata kelola pemerintahan dan kinerja pembangunan daerah (Sugiyono, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis perkembangan *good governance* dan kinerja pembangunan perkotaan di Kota Surabaya selama periode 2019–2023. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian disajikan secara deskriptif dengan mengacu pada data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Kota Surabaya serta dokumen Pemerintah Kota Surabaya (Badan Pusat Statistik, 2023; 2024).

Dalam penelitian ini, indikator *good governance* diproksikan melalui penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, khususnya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sementara itu, kinerja pembangunan perkotaan diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan. Ketiga indikator tersebut dipilih karena dinilai mampu merepresentasikan kondisi pembangunan daerah secara komprehensif, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dasar kebijakan tata kelola pemerintahan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022. Kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital. Pada evaluasi SPBE tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya memperoleh indeks sebesar 4,49 dengan predikat

“Memuaskan”, yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan telah berada pada kategori sangat baik dan terus mengalami peningkatan.

Perkembangan Good Governance di Kota Surabaya

Perkembangan *good governance* di Kota Surabaya dalam penelitian ini dapat dilihat melalui upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya melalui implementasi SPBE. Penerapan SPBE tidak hanya berfungsi sebagai alat digitalisasi layanan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 menegaskan bahwa SPBE diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah. Selanjutnya, pembaruan regulasi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Capaian indeks SPBE sebesar 4,49 pada tahun 2023 dengan predikat “Memuaskan” menunjukkan bahwa sistem tata kelola pemerintahan Kota Surabaya telah berkembang ke arah yang lebih modern, terintegrasi, dan adaptif. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2019–2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Pada tahun 2019, IPM Kota Surabaya tercatat sebesar 82,22 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 83,99 pada tahun 2023.

Meskipun pada tahun 2020 terjadi perlambatan akibat dampak pandemi, kenaikan IPM tetap berlangsung meskipun dalam skala yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Surabaya memiliki tingkat ketahanan yang cukup baik terhadap tekanan eksternal. Selain itu, peningkatan yang lebih signifikan pada tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan adanya percepatan pemulihan serta penguatan program pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Surabaya mengalami perbaikan yang berkelanjutan selama periode penelitian, yang tercermin dari peningkatan nilai IPM secara bertahap dari tahun ke tahun.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi Kota Surabaya menunjukkan pola yang lebih fluktuatif dibandingkan indikator lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024), pada tahun 2020 perekonomian Kota Surabaya mengalami kontraksi sebesar 4,85 persen akibat dampak pandemi COVID-19.

Namun demikian, pada tahun 2021 mulai terlihat tanda-tanda pemulihan yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selanjutnya, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mencapai 6,51 persen dan pada tahun 2023 sebesar 5,70 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Surabaya mampu pulih secara bertahap dan kembali berada pada jalur pertumbuhan yang relatif stabil.

Dengan demikian, meskipun sempat mengalami tekanan yang cukup signifikan pada tahun 2020, perkembangan ekonomi Kota Surabaya dalam periode penelitian secara keseluruhan menunjukkan tren pemulihan yang positif dan berkelanjutan.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Surabaya juga menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode penelitian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023; 2024), jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan selama periode pandemi, yaitu dari sekitar 131 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 152,49 ribu jiwa pada tahun 2021.

Namun demikian, pada periode setelah pandemi, jumlah penduduk miskin mulai mengalami penurunan, yaitu menjadi 138,21 ribu jiwa pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 136,37 ribu jiwa pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan kemiskinan.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kemiskinan akibat tekanan eksternal, pemerintah daerah mampu mengendalikan dan menurunkan kembali angka kemiskinan pada periode pemulihan.

Tren Implementasi Indikator Digitalisasi Pemerintahan (2019–2023)

Digitalisasi pemerintahan merupakan salah satu dimensi good governance yang mengalami kemajuan paling pesat di Kota Surabaya selama periode kajian. Surabaya telah memulai transformasi digital pemerintahan lebih awal dibandingkan sebagian besar kota di Indonesia, dengan pengembangan sistem e-government terpadu yang kemudian dikenal sebagai Surabaya Single Window (SSW) sejak pertengahan 2010-an.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa Skor SPBE Kota Surabaya mengalami peningkatan konsisten dari 3,01 pada tahun 2019 menjadi 3,54 pada tahun 2022, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 2,21 (Kemkominfo, 2023). Meskipun evaluasi SPBE untuk tahun 2023 masih dalam proses publikasi, tren positif ini didukung oleh berbagai capaian konkret, antara lain: peningkatan jumlah layanan publik online dari 147 jenis layanan pada 2019 menjadi 343 layanan pada 2023, implementasi penuh sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta integrasi 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu platform pengelolaan data terpadu.

Tabel 1. Perkembangan Indikator Digitalisasi Pemerintahan Kota Surabaya 2019–2022.

Indikator Digitalisasi	2019	2020	2021	2022
Skor SPBE	3,01	3,10	3,28	3,54
Jumlah Layanan Online	147	198	267	343
Cakupan e-Procurement (%)	72,3	83,1	91,6	97,4
Pengguna Aplikasi Wargaku (ribu)	215	387	523	698

Pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 justru menjadi katalis percepatan digitalisasi yang signifikan. Kebutuhan untuk meminimalkan kontak fisik mendorong percepatan migrasi layanan publik ke platform digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, misalnya, berhasil memindahkan 100 persen layanan administrasi kependudukan ke sistem online dalam kurun waktu tiga bulan sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April 2020 (Pemerintah Kota Surabaya, 2021).

Meski demikian, kemajuan digitalisasi tidak lepas dari tantangan. Survei Bappeko Surabaya (2022) menemukan bahwa sekitar 23 persen penduduk di atas 55 tahun masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital, dan sekitar 18 persen rumah tangga dengan penghasilan rendah melaporkan keterbatasan akses internet yang menghambat pemanfaatan layanan online. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik, meski efisien secara agregat, masih menyimpan risiko eksklusivitas yang perlu diatasi melalui pendampingan digital yang sistematis.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sebagaimana dijelaskan dalam metode penelitian (Sugiyono, 2022). Analisis ini bertujuan untuk melihat kecenderungan (trend) perkembangan indikator pembangunan serta mengidentifikasi hubungan antara *good governance* dan kinerja pembangunan perkotaan.

Analisis Deskriptif IPM

Kenaikan IPM Kota Surabaya secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Stabilitas peningkatan ini, termasuk pada masa pandemi, mengindikasikan bahwa program pembangunan manusia yang dijalankan pemerintah daerah memiliki daya tahan yang cukup kuat terhadap berbagai tekanan eksternal.

Selain itu, percepatan kenaikan IPM pada periode pascapandemi menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga diikuti dengan penguatan pada sektor-sektor dasar pembangunan manusia.

Analisis Deskriptif Pertumbuhan Ekonomi

Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sektor ekonomi perkotaan sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Namun, kemampuan Kota Surabaya untuk kembali tumbuh pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya kapasitas adaptasi yang cukup baik.

Pemulihan ekonomi yang relatif cepat ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi daerah memiliki fondasi yang cukup kuat serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang responsif terhadap kondisi krisis.

Analisis Deskriptif Kemiskinan

Pola peningkatan kemiskinan selama pandemi dan penurunan pada periode setelahnya menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan bahwa program pemulihan sosial dan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan dampak yang nyata.

Pembahasan

Keterkaitan Good Governance dengan Peningkatan IPM

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa peningkatan kualitas *good governance* di Kota Surabaya berjalan searah dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2019–2023. Hal ini dapat dilihat dari tren IPM yang meningkat secara konsisten dari 82,22 pada tahun 2019 menjadi 83,99 pada tahun 2023.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat, yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, mengalami perbaikan dari waktu ke waktu (Badan Pusat Statistik, 2023). Dalam konteks ini, penguatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan SPBE berperan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, terutama dalam hal pelayanan publik.

Dengan adanya sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi dan berbasis digital, pemerintah daerah dapat menjalankan program secara lebih tepat sasaran dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan IPM di Kota Surabaya dapat dipahami sebagai salah satu indikator bahwa *good governance* berkontribusi positif terhadap pembangunan manusia.

Keterkaitan Good Governance dengan Pemulihan Ekonomi

Hubungan antara *good governance* dan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya menunjukkan pola yang lebih dinamis. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 4,85 persen akibat pandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja ekonomi daerah.

Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya, perekonomian Kota Surabaya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan pertumbuhan sebesar 6,51 persen pada tahun 2022 dan 5,70 persen pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *good governance* tidak dapat sepenuhnya mencegah dampak krisis, tata kelola pemerintahan yang baik mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merespons dan memulihkan kondisi ekonomi.

Dalam hal ini, peran *good governance* lebih terlihat sebagai faktor pendukung yang membantu menciptakan stabilitas kebijakan, mempercepat implementasi program, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Keterkaitan Good Governance dengan Penurunan Kemiskinan

Dari sisi kemiskinan, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya mengalami peningkatan pada masa pandemi, kemudian menurun pada periode setelahnya. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sekitar 131 ribu jiwa, meningkat menjadi lebih dari 150 ribu jiwa pada tahun 2021, dan kemudian menurun kembali menjadi sekitar 136 ribu jiwa pada tahun 2023.

Pola ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh situasi krisis. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan setelah pandemi mengindikasikan adanya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dalam konteks ini, *good governance* berperan dalam meningkatkan efektivitas distribusi bantuan, ketepatan sasaran program sosial, serta kualitas pelayanan publik. Dengan tata kelola yang lebih baik, pemerintah daerah dapat merespons permasalahan kemiskinan secara lebih cepat dan terarah.

Pembahasan Umum

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan *good governance* di Kota Surabaya memiliki hubungan yang positif dengan kinerja pembangunan perkotaan. Hal ini terlihat dari peningkatan IPM yang konsisten, penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi, serta pemulihan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, hubungan tersebut tidak bersifat langsung atau sederhana. Kinerja pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan nasional, serta dampak krisis seperti pandemi.

Dengan demikian, *good governance* dapat dipahami sebagai faktor yang memperkuat efektivitas pembangunan, bukan sebagai satu-satunya penentu keberhasilan. Tata kelola pemerintahan yang baik membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat proses pemulihan ketika terjadi gangguan ekonomi dan sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* di Kota Surabaya selama periode 2019–2023 menunjukkan perkembangan yang positif, terutama melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang ditunjukkan melalui capaian indeks SPBE dengan predikat “Memuaskan” mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari sisi kinerja pembangunan perkotaan, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode penelitian (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup masyarakat terus mengalami perbaikan, bahkan di tengah tekanan pandemi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami kontraksi pada tahun 2020, namun mampu pulih dan kembali tumbuh secara positif pada tahun-tahun berikutnya (Badan Pusat Statistik, 2024). Adapun tingkat kemiskinan menunjukkan pola peningkatan selama pandemi, kemudian menurun secara bertahap pada periode pemulihan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* memiliki hubungan positif dengan kinerja pembangunan perkotaan. Hal ini sejalan dengan konsep tata

kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam mendukung keberhasilan pembangunan (Sugiyono, 2022). Meskipun demikian, kinerja pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan situasi global.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya melalui penguatan implementasi SPBE dan inovasi pelayanan publik. Pengembangan sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi dan responsif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

b. Bagi Pengambil Kebijakan

Pengambil kebijakan di tingkat daerah maupun pusat perlu memperhatikan bahwa *good governance* merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode yang lebih kompleks, seperti analisis kuantitatif inferensial atau pendekatan komparatif antar daerah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara *good governance* dan kinerja pembangunan.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung penerapan *good governance* melalui partisipasi dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan publik, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Andrews, M. (2021). Reformasi dan Tata Kelola Sektor Publik: Meningkatkan Kinerja Sektor Publik. *The World Bank Research Observer*, 36(3), 109-134. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkab003>
- Bellastuti, D. B., & Fathurrahman, R. (2023). Konsepsi Good Urban Governance sebagai Kerangka Pembangunan Kota Berkelanjutan. *Dialogue*, 5(2), 600-623. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060>
- BPS. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Creswell, J. W. (2022). *Edisi Ketiga Penelitian Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf
- Fauzan, & Jahja, A. S. (2021). Dinamika Intelektual Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Studi Analisis Bibliometrik. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 36(2), 155-178. <https://doi.org/10.22146/jieb.v36i2.1411>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education. <https://ideator.sasfin.com/public/Resources/Documents/basic%20econometrics%20by%20gujarati%205th%20edition.pdf>
- Johnston, M. P. (2017). Secondary data analysis: A method of which the time has come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, 3(3), 619-626. <https://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/169/170>
- Karunia, R. L., Darmawansyah, D., & Dewi, K. S. (2023). The Importance of Good Governance in the Government Organization. *Humaniora*, 4(1), 1-6. <https://doi.org/10.28991/HIJ-2023-04-01-06>
- Kim, S., & Lee, J. (2021). E-Government dan Kepercayaan Publik: Peran Tata Kelola Digital dalam Kinerja Sektor Publik. *Government Information Quarterly*, 38, 101493. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101493>
- Maulida Ni'mah, N., Wibisono, B. H., & Roychansyah, M. S. (2021). Tata Kelola Keberlanjutan dan Ketahanan Perkotaan: Tinjauan dari Perspektif Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 32(1), 83-98. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2021.32.1.6>
- Meijer, A., Bolívar, M. P. R., & Kempeneer, S. (2021). Pola Pikir Big Data: Tantangan Epistemologis terhadap Akuntabilitas dan Transparansi dalam Regulasi Berbasis Data. *Government Information Quarterly*, 38(3), 101578. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101578>
- OECD. (2022). *Government at a Glance 2022*. <https://doi.org/10.1787/1c258f55-en>
- Pramessti, M. A., Aji, R. B., Hanafi, N. F., Darmawan, M. S., & Suswanto, B. (2025). Kajian profesionalisme dan kode etik insinyur dalam kualitas pekerjaan proyek pembangunan gedung X. *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang Dan Teknik Sipil*, 3(3), 266–277. <https://doi.org/10.61132/konstruksi.v3i3.981>
- Sekur, T., Rematobi, W., & Murniyasih, E. (2025). Penerapan value engineering pada proyek pembangunan gedung. *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang Dan Teknik Sipil*, 3(4), 219–238. <https://doi.org/10.61132/konstruksi.v3i4.1165>

- Shah, A., & Boadway, R. (2021). Desentralisasi Fiskal dan Federalisme Fiskal di Abad ke-21. *The World Bank*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1580-5>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UN-Habitat. (2022). *World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities*. <https://unhabitat.org>
- World Bank. (2022). *Worldwide Governance Indicators (WGI): 2022*. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- Zięba, M. (2021). Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan dan Lokasi Perkantoran. *Zarządzanie Publiczne / Public Governance*, 56(2), 5-18. <https://doi.org/10.15678/ZP.2021.56.2.05>